

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMPUTISASI UPT WILAYAH 1 TPU CIBARUNAY KOTA BANDUNG

Mochamad Ramdan¹⁾, Muhammad Daffa Rafyandi²⁾, Muhammad Dimas Ferninda³⁾ Putri Astiti⁴⁾

¹²³ STIA Bagasasi Bandung

E-mail: yudiramdan06@gmail.com, daffarfdy@gmail.com, dimasred55@gmail.com, putriastiti87@gmail.com

KEYWORDS

Implementation
Funeral
Turfization System

Kata Kunci

Implementasi
Pemakaman
Sistem Rumputisasi

ABSTRACT

Identifying and obtaining information is the purpose of research on the Implementation of the Turfization System Policy of UPT region 1 TPU Cibarunay Bandung City. This research uses a descriptive qualitative approach and uses data collection techniques such as interviews, observation and documentation. This research provides an explanation of the Implementation of the Turfization System Policy of UPT region 1 TPU Cibarunay Bandung City. The results of this research illustrate and show that based on its implementation there is inconsistency in the implementation of policy regulations in accordance with the Bandung City Regional Regulation, due to obstacles and shortcomings.

ABSTRAK

Identifikasi dan memperoleh informasi merupakan tujuan dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menggambarkan dan menunjukkan bahwa berdasarkan implementasi nya terdapat ketidak konsistenan dalam pelaksanaan regulasi kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung, karena hambatan dan kekurangannya.

1. Pendahuluan

Pemakaman umum adalah fasilitas yang penting bagi masyarakat atau publik untuk menguburkan anggota yang meninggal dunia. Pemerintah daerah merupakan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemakaman. Pemakaman juga memiliki beberapa kegunaan, yakni daerah resapan untuk air, ruang penghijauan, dan sebagai pusat paru-paru kota. Lahan pemakaman pun tidak hanya sebagai lahan untuk fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU), melainkan menjadi lahan untuk berbagai jenis tumbuhan, khususnya tumbuh-tumbuhan hijau seperti pohon yang berbuah, rumput, dan tumbuhan lainnya (Warlina 2019).

Pemerintah dalam hal ini menjadi subjek dalam pembuatan dan perumusan kebijakan. Salah satunya mengenai sistem kebijakan konstruksi makam yang harus di rumputisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara nya, peneliti menemukan banyak makam yang belum di rumputisasi terhadap objek yang ada di TPU. Penemuan ini adalah salah satu fakta bahwa tidak sesuai dengan regulasi aturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Warlina 2019).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2)

menyebutkan bahwa tanah makam harus sesuai dengan ukuran panjang tinggi lebarnya dari permukaan tanah, dan dapat di tekankan di dalam regulasinya tercantum harus ditanami rumput atau di rumputisasi. Pemakaman sebagai salah satu elemen yang merupakan ruang terbuka hijau di suatu perkotaan, namun melihat dari pandangan realita kurangnya keefisienan dalam penerapannya karena masih banyak makam yang menggunakan beton juga penghias lainnya yang menghambat suburnya tanaman terutama tumbuhan rumput hijau dan pohon yang berbuah (Hardiyanto 2023).

Pada kenyataannya, sistem rumputisasi yang diimplementasikan oleh salah satu Unit Pengelola Terpadu (UPT) wilayah 1 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cibarunay Kota Bandung masih banyak yang belum terealisasikan dalam sistem rumputisasi hanya ada beberapa dari sekian banyaknya makam, sedangkan temuan peneliti di lapangan melihat banyaknya makam yang masih di beton juga di beri ornamen hiasan pada makam dan menurut informan, para ahli waris belum sepenuhnya sadar akan sistem rumputisasi terlepas dari regulasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Warlina 2019).

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada saat melakukan observasi dan wawancara dilapangan, banyaknya makam yang masih di beton dan di hiasi oleh ornamen berat seperti penembokan dan pendirian

bangunan disekitar makam, serta sedikitnya makam

MAKAM TPU	JUMLA MAKAM	MAKAM MPUTISASI	MAKAM ANG BELUM JUMPUTISASI
Cibarunay	10.198	6.924	3.274

yang sudah di rumputisasi. Ketidaksesuaian ketentuan regulasi kebijakan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tanah makam harus berbentuk sesuai dengan aturan panjang tinggi lebarnya yang tercantum serta ditanami rumput hijau. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti merancang penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi yang Peneliti lakukan terhadap kepala pengelola TPU dan Tenaga Honorer adalah berdasarkan data yang disajikan oleh pihak pengelola, dalam analisisnya Peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data secara deskriptif berupa data kata-kata secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai data dilapangan dalam proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia, menurut Creswell (Waruwu 2023). Objek penelitian Kami adalah Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung. Data terkumpul di analisis dengan cara deksriptif. Peneliti menggunakan teknik deskriptif yang difokuskan kepada pemahaman suatu permasalahan, konteks, dan tidak menarik kesimpulan yang luas. Sumber data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari informan, gambar, dan referensi penelitian terdahulu.

3. Pembahasan

Hasil dan pembahasan yang dituju merupakan pemberian pemahaman lebih secara mendalam mengenai indikator penelitian sebagai acuan adalah teori dari Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan yang juga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pengelolaan pada UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung dapat dikategorikan berhasil dan

hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasinya.

Sumber : Data Primer yang di peroleh peneliti 2024.

Tabel 1. Data Rumputisasi Makam UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung.

Berdasarkan tabel diatas, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu informan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengelola pemakaman, peneliti mendapatkan hasil fakta dilapangan yaitu, sistem rumputisasi dalam pengimplemantasiannya masih banyak yang belum sesuai dengan regulasi kebijakannya, dikarenakan:

1) Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yaitu masyarakat belum merata sehingga masih banyak yang belum mendapatkan informasi tersebut.

2) Ahli waris yang sudah mengetahui regulasi kebijakannya belum sepenuhnya mentaati peraturan dari pemerintah, sehingga dampak yang ditimbulkan adanya biaya yang ditanggung oleh pengelola kantor TPU Cibarunay.

3) Harga rumput untuk rumputisasi terlambung tinggi dan mahal. Dampak lain dari tidak terjadinya rumputisasi secara tidak merata menyebabkan kerugian pada pihak pengelola makam.

Pembahasan masing-masing indikator dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung” adalah sebagai berikut.

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebagai aspek komponen penting dalam pengukur implementasi regulasi kebijakan menurut teori Charles O. Jones yang dijelaskan oleh (Hardiyanto, Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis 2023). Proses pembentukan atau penataan sumber daya, unit, dan metode merupakan acuan dalam pengorganisasian yang telah disesuaikan dengan tujuan dan targetnya.

1) Penataan Sumber Daya Manusia

Nama TPU	Jumlah	Jumlah

	ASN	Pekerja
TPU Cibirunay	2 ASN	5 PHL 3 Tenaga Tambahan

Sumber : Data Primer yang di peroleh peneliti 2024.

Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia yang ada di UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung.

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan dalam implementasi kebijakan rumputisasi terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah pegawai kantor dan pegawai lapangan, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan makam. Dengan jumlah makam yang banyak, setiap pegawai lapangan yaitu PHL dan Sukwan harus bertanggung jawab untuk mengelola, merawat, dan memelihara sebanyak 10.198 makam. Sumber daya manusia yang terbatas mempengaruhi kemampuan dalam implementasi kebijakan rumputisasi yang tertuju pada pelaksanaan pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan makam.

2) Penataan sarana dan prasarana

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan rumputisasi salah satu aspek yang berperan penting merupakan sarana dan prasarana. Sarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas kebijakan, produktivitas, dan pengoptimalan target yang telah dituju. Prasarana menunjang dalam memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan regulasi kebijakan, sehingga terciptanya pembaharuan

Berdasarkan wawancara dan observasi serta temuan fakta dilapangan, bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung belum memadai. Pihak pengelola dalam hal ini masih terus mengoptimalkan dalam peningkatan pengembangan penunjang dalam hal ini sarana dan prasarana.

2. Interpretasi

Aspek interpretasi merupakan salah satu pengukur imolementasi regulasi kebijakan pemerintah Menurut Charles O. Jones (Hardiyanto, Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis 2023). Terdapat konteks dalam interpretasi kebijakan, yaitu peranan pelaksana sebagai subjek dalam pemahaman tujuan utama atau target dari kebijakan yang akan di implementasikan dan dalam penerjemahannya melalui langkah-langkah praktis pada pelaksanaan. Interpretasi menjadi suatu rancangan perencanaan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan regulasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta fakta dilapangan yang peneliti dapatkan, pengelola pemakaman memiliki pemahaman terkait standarisasi regulasi kebijakan pada Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung. Pada kenyataannya para petugas lapangan selalu melakukan pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan rumput makam dengan cara memotong rumput yang sudah tinggi sesuai regulasinya, menyiram rumput rutinan pagi dan sore pada area makam, memelihara tumbuhan hijau seperti pohon yang berbuah dan tumbuhan hijau lainnya.

3. Aplikasi

Menurut Charles O. Jones (Hardiyanto, Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis 2023) aspek aplikasi merupakan peranan penting dalam proses mengukur implementasi regulasi kebijakan. Pelayanan, pembayaran, dan lainnya merupakan acuan yang mengarah kepada langkah-langkah atau suatu keputusan yang diputuskan secara rinci, detail, teratur, dan konsisten. Proses langkah tersebut merupakan ketetapan rutin yang dilakukan oleh pengelola TPU untuk melaksanakan visi dari regulasi kebijakan implementasi khususnya pada Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT 1 wilayah TPU Cibirunay Kota Bandung.

Pada kenyataannya, peneliti masih banyak menemukan makam yang belum di rumputisasi dan tidak sesuai dengan regulasi kebijakan pemerintah, baik dari segi kontruksi makam yang masih adanya bangunan disekitar makam dan tidak menggunakan sistem rumputisasi. Regulasi Implementasi Kebijakan Rumputisasi UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 15 yang berbunyi:

1) Ukuran luas tanah makam ditetapkan 2 X 1 m² (dua kali satu meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter persegi) dari permukaan tanah.

2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput.

3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35 cm.

4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama. Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:

- a) Nomor;
- b) Nama;
- c) Blok;
- d) Tanggal lahir;
- e) Tanggal meninggal/pemakaman.

Peneliti menemukan fakta dilapangan yang diperoleh melalui informan menunjukkan dan memberikan penegasan bahwa adanya ketidak konsistenan dalam pelaksanaan regulasi kebijakan nya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 15. Suatu produk dari pemerintah Kota Bandung dalam hal ini regulasi kebijakan masih dalam tahap pengembangan serta pengoptimalisasian dalam situasi kondisi tertentu. Peningkatan pelaksanaan program rumputisasi ini masih diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata.

4. Kesimpulan

Dampak lingkungan dan sosial menjadi tantangan pada Implementasi kebijakan rumputisasi di UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun regulasi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung, konsistensi dalam implementasinya masih menjadi permasalahan. Perumusan langkah-langkah strategis lainnya untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman umum. Rekomendasi untuk peningkatannya meliputi intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, dalam peningkatan sarana dan prasarana di TPU Cibirunay.

Menurut regulasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 15, peneliti menemukan fakta dilapangan yang diperoleh melalui informan dalam proses

wawancara dan obsrvasi dalam pengambilan data, menunjukkan dan memberikan penegasan bahwa adanya ketidak konsistenan dalam pelaksanaannya regulasi kebijakan tersebut.

Sistem rumputisasi pada kenyataannya masih banyak yang belum sesuai dengan regulasi kebijakannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara menurut informan UPT wilayah 1 TPU Cibirunay Kota Bandung dikarenakan:

1) Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yaitu masyarakat belum merata sehingga masih banyak yang belum mendapatkan informasi tersebut.

2) Ahli waris yang sudah mengetahui regulasi kebijakannya belum sepenuhnya mentaati peraturan dari pemerintah, sehingga dampak yang ditimbulkan adanya biaya yang ditanggung oleh pengelola kantor TPU Cibirunay.

3) Harga rumput untuk rumputisasi terlambung tinggi dan mahal. Dampak lain dari tidak terjadinya rumputisasi secara tidak merata menyebabkan kerugian pada pihak pengelola makam.

5. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt. Atas segala karunia-nya, Peneliti berterimakasih kepada instansi dan pengelola UPT wilayah 1 TPU Cibirunay, Peneliti juga berterimakasih kepada pembimbing, juga kepada teman-teman yang sudah bersama-sama dalam kegiatan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Alfalah, G., & Zayed, T. (2020). A review of sustainable facility management research. *Sustainable Cities and Society*, 55, 102073.
- Aripin, T. I. (2022, November 29). Permudah Layanan Pemakaman Kota Bandung dengan Aplikasi Simpelman -Sisi Jabar.
- C. I. Koswara, Arwi Yudhi and Santoso, Eko Budi and Afif, Abdul and Hariyati, Teti and Sutikno, Sutikno and Umilia, Ema and Prianti, Prianti and Pamungkas, Rahel Putri and Annisa, "Analisis kebutuhan pembangunan tempat pemakaman umum di perkotaan Tuban," *TATALOKA*, vol. 23, Universitas Diponegoro 2021.
- Hardiyanto, M. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana

- Teknis. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 3.
- I. Rusdi, I. F. Widy dan H. Husein, “Rancang Bangun Sistem Informasi Tempat Pemakaman Umum Pondok Rajeg Bogor,” *Jurnal Teknik Komputer Amik BSI*, vol. V, no. 2, pp. 219-226, 2019.
- Purba, N. H. (2020). Analisis dan Pencatatan Pelaporan Kematian Maternal. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and ...*, 4(3), 411–422.
- Sari, I., Hidayat, T., Biyatmoko, D., & Suyanto, S. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 120-130.
- Sinamo, R., Putro, S. S., & Sukarno, D. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/PemakaianTanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah). *JANE -Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 176.
- Warlina, A. d. (2019). EVALUASI PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BANDUNG. *JURNAL WILAYAH DAN KOTA*, 15.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2898.